



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN TATA KELOLA
Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon / Faksimile 021-85910107 E-mail : perencanaan@bpkp.go.id

Nomor : PR.00/S-907/SU01/1/2022

11 Oktober 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Penyesuaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP
di Tempat

Sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022, melalui surat ini kami sampaikan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan tahun 2022. Kami mohon kepada Bapak/Ibu agar melakukan penginputan data Perjanjian Kinerja masing-masing pada menu *e-perkin* pada aplikasi *e-sakip* BPKP. Penginputan paling lambat pada hari Jumat, 14 Oktober 2022. Panduan penginputan dapat dilihat pada *user guide* aplikasi *e-sakip* BPKP.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi dan Tata Kelola

Ditandatangani secara elektronik oleh

Setya Nugraha
NIP 19690809 199003 1 001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Para Deputi Kepala BPKP



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP SULAWESI SELATAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.221
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	760.379
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.300
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85
		2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Topik APPD	2
		2.4	Persentasi rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1
		3.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	10
		3.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	4
		3.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	55
		3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	2
		3.6	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0
		3.7	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	0
		3.8	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLU/D	1
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100
		4.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	80
		4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3
		4.4	Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK	Pemda	1
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	0
		5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	13
		5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1
		5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	16
		5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	0
		5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
		5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Jumlah	0
		5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	20
		5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	20
		5.10	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0
		5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	6
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
		6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82
		6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70
		6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100
		6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75
		6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95
		6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80

Program	Anggaran
1 Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp 8.189.707.000,00
2 Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp 29.733.949.000,00
	Rp 37.923.656.000,00

Kepala BPKP

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik

Muhammad Yusuf Ateh

Jakarta, 30 September 2022

Kepala Perwakilan

Dokumen telah ditandatangani secara elektronik

Rizal Suhaili

